

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, ketergantungan daerah, total aset, dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan yang hasilnya telah diuraikan secara lengkap pada bab sebelumnya dengan pengujian hipotesis tentang variabel yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekayaan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat diprosikan dengan PAD memberikan pengaruh negatif pada item pengungkapan yang akan disajikan. Temuan tersebut dapat disebabkan apabila pemerintah daerah tidak mampu melakukan pengelolaan yang baik atas kekayaan daerahnya, maka pemerintah daerah tersebut akan kesulitan dalam menyajikan pengungkapan sesuai SAP yang berlaku. Selain itu, PAD yang dimiliki oleh suatu daerah akan digunakan untuk kemakmuran daerahnya, bukan untuk upaya meningkatkan pengungkapan yang harus disajikan.
2. Ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ketergantungan daerah tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut dapat disebabkan karena dana transfer yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada daerah tidak bergantung pada tingkat pengungkapan yang disajikan.
3. Total aset berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa total aset yang dimiliki oleh suatu daerah memberikan pengaruh positif pada item pengungkapan yang akan disajikan. Temuan tersebut dapat disebabkan karena daerah yang memiliki total aset yang tinggi perlu mengungkapkan

informasi secara detail dan kompleks atas pengelolaan aset yang dimiliki sesuai dengan SAP yang berlaku.

4. Opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa opini audit yang diperoleh suatu daerah memberikan pengaruh positif pada item pengungkapan yang akan disajikan. Temuan tersebut dapat disebabkan karena untuk memperoleh opini audit yang baik maka pemda perlu menyajikan pengungkapan secara details dan kompleks yang akan diperlukan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tingkat pengungkapan di Indonesia dengan menggunakan data yang menyatakan bahwa kasus pengungkapan LKPD yang terjadi pada tahun yang ingin diteliti sehingga benar-benar menggambarkan tingkat pengungkapan LKPD yang terjadi pada tahun tersebut. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan pengaruh pengaruh sumber daya manusia, kompleksitas pemerintah daerah, dan faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan sampel kabupaten/kota yang berbeda serta pengukuran yang berbeda juga. Hal tersebut dapat membantu ketepatan dan keakuratan dalam penelitian yang akan datang.

2. Saran Praktis

a. Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah khususnya pada kabupaten/kota di Pulau Kalimantan diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat pengungkapan yang disajikan sesuai SAP yang berlaku. Mengingat rata-rata tingkat pengungkapan LKPD di Pulau Kalimantan hanya sebesar 65%. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung desentralisasi fiskal yang baik. Selain itu, pemerintah daerah agar lebih meningkatkan

komitmen dalam hal penyajian *mandatory disclosure* pada laporan keuangan.

b. Kepala Daerah

Bagi kepala daerah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien untuk melakukan peningkatan atas pengungkapan laporan keuangan yang akan disajikan. Selain itu juga dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan terhadap SAP yang berlaku.